

Volume 1 Nomor 1 April 2016

ISSN 2443-3918

Jurnal Membaca

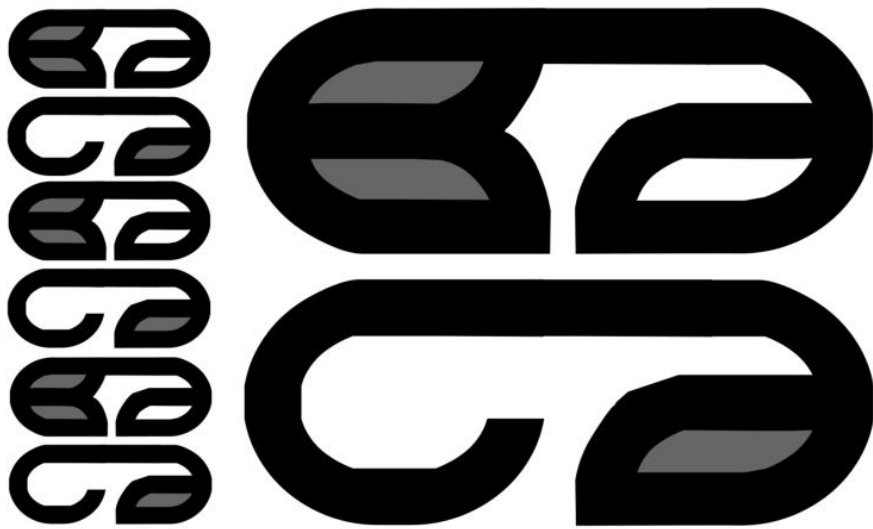
BAHASA & SAstra INDONESIA



Diterbitkan oleh
MLI Cabang Untirta dan HISKI Banten

Jurnal Membaca

BAHASA & SASTRA INDONESIA



Diterbitkan oleh
MLI Cabang Untirta dan HISKI Banten

JURNAL MEMBACA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Pertama kali menerbitkan jurnal volume 1 nomor 1 pada April 2016, jurnal ini memuat tulisan-tulisan sekitar bahasa dan sastra Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan studi ilmiah di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia.

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab:

Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd.

Redaktur:

Arip Senjaya, S.Pd., M.Phil.

Mitra Bestari:

Dr. Yeyen Maryani, Hum.

Dr. Sumiyadi, M.Hum.

Desain Grafis dan Fotografer:

Farid Ibnu Wahid, M.Pd.

Desma Yuliadi Saputra, S.Pd.

Sirkulasi:

Mufti Lathfullah Syaukat Fasya

Dewan Penyunting:

Dr. Dase Erwin Juansah, M.Pd.

Dr. Ade Husnul Mawadah, M.Hum.

Dr. Hj. Tatu Hilaliyah, M.Pd.

Odien Rosidin, S.Pd., M.Hum.

Sekretariat:

Ahmad Supena, S.Pd., M.A.

Erwin Salpa Riansi, M.Pd.

Lela Nurfarida, M.Pd.

Ilmi Solihat, M.Pd.

TEKNIK PENULISAN

Para kontributor hanya diperbolehkan menulis menggunakan bahasa nasional dan bahasa internasional (khususnya bahasa Inggris). Jika tulisan dalam berbahasa Indonesia maka abstrak dalam bahasa Inggris dan bila tulisan bahasa Inggris, maka abstrak menggunakan bahasa Indonesia.

Alamat Redaksi:

Jalan Raya Jakarta KM. 4, Pakupatan Serang-Banten,

Telepon (0254) 280330 ext. 111

email: jmbpsi@untirta.ac.id / fwahid77@yahoo.co.id

PERSYARATAN PENULISAN JURNAL MEMBACA

Bahasa dan Sastra Indonesia

PEDOMAN PENULISAN:

1. **Jenis Artikel:** Artikel seyogianya merupakan tulisan yang didasarkan pada hasil penelitian empirik (antara lain dengan menggunakan strategi penelitian ilmiah termasuk survei, studi kasus, percobaan/eksperimen, analisis arsip, dan pendekatan sejarah), atau hasil kajian teoretis yang ditujukan untuk memajukan teori yang ada atau mengadaptasi teori pada suatu keadaan setempat, dan/atau hasil penelaahan teori dengan tujuan mengulas dan menyintesis teori-teori yang ada. Semua jenis artikel belum pernah dimuat di media apapun.
2. **Format Tulisan:** Tulisan harus sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia dengan ekstensi file docx. (Microsoft Word) dan menggunakan acuan sebagai berikut.
 - 2.a Margin: Kiri & Atas (4 cm), Kanan & Bawah (3 cm)
 - 2.b Ukuran Kertas: A4 (21 cm x 29,7 cm)
 - 2.c Jenis huruf: Times New Roman
 - 2.d Ukuran Font: 12 pt
 - 2.e Spasi: 1,5 (kecuali judul, identitas penulis, abstrak dan referensi: 1 spasi)
 - 2.f Penulisan judul menggunakan huruf kapital dan sub-judul dengan huruf besar-kecil.
 - 2.g Jumlah halaman termasuk tabel, diagram, foto, dan referensi adalah 15-20 halaman.
3. **Struktur Artikel:** Untuk artikel hasil penelitian menggunakan struktur sebagai berikut:
 - 3.a Judul idealnya tidak melebihi 12 kata yang menggunakan Bahasa Indonesia, 10 kata yang menggunakan Bahasa Inggris, atau 90 ketuk pada papan kunci, sehingga sekali baca dapat ditangkap maksudnya secara komprehensif
 - 3.b Identitas penulis (baris pertama: nama tanpa gelar. Baris kedua: prodi/jurusan/instansi. Baris ketiga: alamat lengkap instansi. Baris keempat: alamat email dan nomor HP. Untuk penulis kedua dan seterusnya selain nama dicantumkan di *footnote* halaman pertama);
 - 3.c Abstrak. Jika bagian isi dalam bahasa Indonesia, maka abstrak dibuat dalam bahasa Inggris. Jika bagian isi dalam bahasa Inggris, maka abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia. Ditulis secara gamblang, utuh, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan dan dibuat dalam satu paragraf.
 - 3.d Kata kunci dipilih secara cermat sehingga mampu mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait untuk membantu peningkatan keteraksesan artikel yang bersangkutan.
 - 3.e Sistematika penulisan untuk penelitian empirik
 - i. Pendahuluan: Berisi latar belakang masalah penelitian, dasar pemikiran, tujuan, manfaat.
 - ii. Kajian Pustaka: Bahan yang diacu dalam batas 10 tahun terakhir. Karya klasik yang relevan dapat diacu sebagai sumber masalah tetapi tidak untuk pembandingan pembahasan.

- iii. Metode Penelitian: Menggunakan metode penelitian yang relevan.
 - iv. Analisis dan Hasil: Mengungkapkan analisis dan hasil penelitian, membahas temuan, sesuai dengan teori dan metode yang digunakan
 - v. Penutup
 - vi. Daftar Pustaka: Nama belakang/keluarga, nama depan. Tahun. Judul (tulis miring). Kota: Penerbit
- 3.f Sistematika penulisan untuk kajian teoretis
- i) Judul (Tidak lebih dari 10 kata);
 - ii) Identitas Penulis (Baris pertama: nama tanpa gelar. Baris kedua: prodi/ jurusan/ instansi. Baris ketiga: alamat lengkap instansi. Baris keempat: alamat email dan nomor HP);
 - iii) Abstrak (Dibuat dalam bahasa Inggris, maksimal 150 kata; disertai kata kunci maksimal lima kata);
 - iv) Pendahuluan (Berisi latar belakang disertai tinjauan pustaka dan tujuan);
 - v) Pembahasan (Judul bahasan disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dibagi ke dalam sub-bagian);
 - vi) Simpulan;
 - vii) Referensi (Memuat referensi yang diacu saja, minimal 80% terbitan 10 tahun terakhir).

4. Penyuntingan

- 4.a Artikel dikirim kepada tim redaksi dengan alamat email: jmbisi@untirta.ac.id (cc: Andezamsed@gmail.com dan fwahid77@yahoo.co.id) jika menggunakan file dalam bentuk CD dikirim ke alamat redaksi.
- 4.b Artikel yang telah dievaluasi oleh tim penyunting atau mitra bebestari berhak untuk ditolak atau dimuat dengan pemberitahuan secara tertulis, dan apabila diperlukan tim penyunting akan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan revisi sesuai dengan rekomendasi hasil penyuntingan. Untuk keseragaman format, penyunting berhak untuk melakukan perubahan artikel tanpa mengubah substansi artikel.
- 4.c Semua isi artikel adalah tanggung jawab penulis, dan jika pada masa pracetak ditemukan masalah di dalam artikel yang berkaitan dengan pengutipan atau HAKI, maka artikel yang bersangkutan tidak akan dimuat. Tulisan yang dimuat dan ternyata merupakan hasil plagiasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
- 4.d Untuk artikel yang dimuat, penulis akan mendapatkan 10 eksemplar berkala sebagai tanda bukti pemuatan, dan wajib memberikan kontribusi biaya pencetakan sesuai ketentuan tim berkala Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia sebesar Rp300.000 di luar ongkos kirim. Untuk penulis intern (Untirta) Rp500.000 tanpa ongkos kirim.

Alamat Redaksi Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Untirta

Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan, Serang-Banten Telp. 0254 280330 ext. 111,
Email: jmbisi@untirta.ac.i

Narahubung:

Farid Ibnu Wahid, M.Pd. (08176961532)
Desma Yuliadi Saputra, S.Pd. (08998666141)

Daftar Isi

PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA ANAK USIA 10 BULAN (studi kasus pada anak laki-laki bernama Muhamad Hafiz Firdaus) Ade Eka Anggraini	105
MEKANISME PERTAHANAN EGO TOKOH AKU DALAM NOVEL SEMUSIM DAN SEMUSIM LAGI KARYA ANDINA DWIFATMA Ahmad Supena dan Firda Rastia	117
KEBIJAKAN BAHASA DAN PENDIDIKAN: MENYOAL PERDA PROVINSI BENGKULU TENTANG BUDAYA, BAHASA, PENGAJARAN BAHASA, DAN POLITIK BAHAS Arono	125
ANALISIS GAYA BAHASA DALAM LIRIK LAGU ALBUM BILA TIBA OST SANG KIAI GRUP BAND UNGU DAN IMPLIKASINYA SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN APRESIASI PUISI DI SMP Dema Tesniyadi	137
METAFORA DALAM LEMBAR OPINI, WUJUD KONGKRET GAMBARAN PERUBAHAN BAHASA Diana Tustiantina	143
PENGGUNAAN ALIH KODE (CODE SWITCHING) DAN CAMPUR KODE (CODE MIXING) SEBAGAI STRATEGI DAYA TARIK IKLAN PADA MAJALAH GAYA HIDUP COSMOPOLITAN Erwin Salpa Riansi	149
CITRA REMAJA DALAM NASKAH DRAMA MAJALAH DINDING KARYA BAKTI SOEMANTO Farid Ibnu Wahid	157
PENGUKURAN TEORI PSIKOLOGI SASTRA ANAK TERHADAP KESESUAIAN ANTARA KARYA SASTRA ANAK DENGAN TINGKAT PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DI SEKOLAH DASAR Herwan FR	163
PEMBELAJARAN MENULIS TEKS PIDATO DENGAN MODEL THINK TALK WRITE DI KELAS IX SMP NEGERI 6 KOTA SERANG Meti Istimurti	171

DERE SEBAGAI VARIASI BAHASA REMAJA	Sundawati Tisnasari	183
KEMAMPUAN MEMBACA ANAK USIA DINI	Tatu Hilaliyah	187
REPOSISI DAN REAKTUALISASI PENDIDIKAN MADRASAH DALAM PEMBELAJARAN DI ERA DIGITAL	Tubagus Rahmat	195
BAHASA KITA DAN PENDIDIKAN KITA	Adang Heriawan	205

KEBIJAKAN BAHASA DAN PENDIDIKAN: MENYOAL PERDA PROVINSI BENGKULU TENTANG BUDAYA, BAHASA, PENGAJARAN BAHASA, DAN POLITIK BAHASA

Arono

Universitas Bengkulu
dank_aron@yahoo.com

Abstrak

Law is expected to overcome the various problems associated with the establishment of practices and procedures for the use of language, as well as regulates various matters related to the establishment and procedures for the use of language, including the set of criminal provisions. In fact, of the nine districts and one municipality, only one Rejang Lebong mempunyai local regulations in terms of culture, language, language teaching and language politics. Very different from the actual conditions in Bengkulu multicultural society the majority of the other group less thinking about the continuity of language and culture in society. This paper describes the language and education policies on the basis of Rejang Lebong Regional Regulation No. 2 of 2009 on the System of Education in Rejang Lebong penyelenggara not ignore the other conditions in the province of Bengkulu. This paper uses a descriptive qualitative methods literature / documentation, interviews, and observations. Education as the organizer of the policy is still responding in one setup educators still focus on one language regardless of the language the other so that the effect on the preparation of educators, the school is still very limited apply learning regional languages? are still in local content selection, and the community is still limited on the use of language and cultural traditions without oriented towards sustainability and the preservation of language and culture developed. In addition, the government less responsive and sensitive to the phenomenon of language and culture of minority communities, as well as geography. Grain to issue teaching, politics national language of wider scope than the policy national language, not only covering the curriculum, teaching materials, staff, linguistic, and means, but also to the study of teaching, determination of didactic and methodical appropriate, as well as the development literature. Several attempts to do planning of language in education, namely (1) Language and education work together to establish, maintain and elevate human dignity. (2) The relationship and a close affinity between the development of language and education development takes place in the family, formal education institutions, and communities. (3) There should be an emphasis and review again in terms of both content and use of language teaching methods contained in the curriculum (4) In daily life in the community seems necessary their appetite similarity in the use of language or terms.

Keywords: language policy, education, culture, language, language teaching, language politics.

PENDAHULUAN

Kebijakan bahasa nasional memberikan perhatian yang lebih luas dan mendalam terhadap bahasa daerah (Alwi dan Sugono, 2003:xxi). Hal itu juga sesuai dengan UUD 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasadaerah yang dipelihara dengan baik oleh para penuturnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara karena bahasa daerah tersebut merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Selain itu, kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000). Kebijakan bahasa sebagai peningkatan mutu penggunaan bahasa daerah dapat dilakukan dengan pelaksanaan program, yaitu penelitian masalah, pengajaran bahasa daerah, dan jalan pemecahannya, perumusan kurikulum, persiapan program khusus pengajaran bahasa daerah yang secara langsung dapat menghasilkan ahli bahasa daerah, penentuan didaktik dan metodik bahasa yang paling cocok, dan pengembangan kepastakaan (Mahsun, 2003:41).

Berbagai kebijakan dan program yang ditetapkan di atas, masih belum dapat dirasakan. Selain disebabkan oleh beratnya pembinaan bahasa daerah, sikap penutur bahasa daerah kurang positif, semakin dominannya pemakaian bahasa nasional, juga bahasa daerah dianggap sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar (Mahsun, 2003:42). Hal itu akan berdampak pada bahasa *marbound* dan *endangered* (Kraus dalam Mahsun, 2003:42). Hal itu juga dialami pada masyarakat Bengkulu. Hal itu terlihat dari sembilan kabupaten dan satu kotamadya, hanya satu kabupaten yang memiliki perda tentang bahasa dan sastra daerah, yaitu Kabupaten Kejang Lebong.

Masyarakat Bengkulu yang wilayahnya sebagian besar berada pada daerah pesisir memiliki keunikan dalam penggunaan bahasanya. Keunikan dan keragaman tersebut dapat dilihat berdasarkan bahasa daerah yang ada. Berdasarkan geografis dan daerah adminis-

tratif bahwa bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu terdiri atas sembilan bahasa, yaitu bahasa Serawai, Besemah, dan bahasa Mulak yang terdapat di Bengkulu bagian selatan, bahasa Melayu Bengkulu di Kota Bengkulu, bahasa Lembak di Bengkulu bagian utara dan Kota Bengkulu, bahasa Rejang di Rejang Lebong dan di Curup, bahasa Muko-Muko dan bahasa Pekal, serta bahasa Enggano terdapat di Bengkulu bagian Utara (Arono, 2004:4). Keanekaragaman membuktikan bahwa wilayah Bengkulu memiliki kekhasan dan pola hidup masyarakatnya, seperti daerah Enggano, Lebong, dan Mulak Bintuhan. Ketiga daerah ini memiliki keunikan tersendiri dalam hal bahasa dan budayanya. Salah satu alasannya, jika kita ke daerah tersebut, kita akan kesulitan dalam memahami dan berkomunikasi kepada masyarakatnya, begitu juga sebaliknya.

Beberapa bahasa daerah Bengkulu yang ada di Provinsi Bengkulu dengan segala kekhasannya sehingga dalam pemilihan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran ditentukan pada daerah setempat yang menggunakan bahasa daerahnya. Hal itu tidak seperti pada daerah-daerah atau pada satu provinsi bisa dikembangkan atau diterapkan dalam pembelajaran dengan satu bahasa daerah. Diterapkannya bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah akan dimungkinkan bahasa daerah terhindar dari kepunahan (Mu'adz dalam Mahsun, 2003:45). Kondisi demikian disebabkan beberapa faktor, yaitu keuntungan psikologis yang diperoleh jika pengajaran berlangsung dengan perantaraan bahasa ibu; tuntutan yang disuarakan oleh berbagai kelompok etnis supaya martabat bahasanya diakui dan pengaruh politis yang dimilikinya di dalam masyarakat; biaya yang diperlukan jika jumlah bahasa pengantar harus dilipatkandakan; ketersediaan kaum guru yang mahir dalam bahasa daerah dan bahasa nasional sekaligus; ketiadaan buku pelajaran dalam bahasa daerah dan konsekuensinya untuk menulis, menerjemahkan, dan

menerbitkannya; sistem pengujian yang setara; objek studi tidak memiliki susastra yang memadai (Bowers dalam Moeliono, 1985:60-61)

Beberapa argumen dan hasil penelitian terhadap bahasa daerah, yaitu penggunaan bahasa daerah dalam proses pembelajaran, siswa tidak menemui kendala atau kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu memungkinkan bahwa bahasa daerah tersebut terhindar dari kepunahan. Namun, bahasa kedua sebagai bahasa pengantar, siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran (Freeman dan Freeman; Cummins dalam Mahsun, 2003:44). Simanjuntak mengemukakan bahwa penggunaan bahasa daerah Enggano oleh masyarakatnya sangat positif dalam penggunaannya. Hal itu dikarenakan masih terbatasnya (Level 2 pada tingkat ILR/ Interagency Language Roundtable, 2007) kemampuan berbahasa Indonesia dalam situasi dan ranah tertentu (2014:33). Untuk menunjang hal tersebut, penelitian mengenai pemahaman kebahasaan dalam pertimbangan kebijakan bahasa terutama bahasa daerah. Hal itu telah dilakukan penelitian oleh Rahayu (1995) dinyatakan bahwa ada tiga daerah persebaran bahasa Rejang berdasarkan berkas peta leksikal dan nonleksikal, yaitu daerah Lebong, daerah Musi, dan daerah Keban Agung. Lebong terhadap Musi terjadi perbedaan subdialek dan Musi terhadap Keban Agung terjadi perbedaan dialek.

Empat aksara ulu, *Ka Ga Nga* milik suku asli Provinsi Bengkulu, Lembak, Rejang, Pasemah dan Serawai sudah bisa diaplikasikan dalam *font* (huruf) di komputer, digitalisasi ini juga tengah dirancang untuk ditransliterasi ke perangkat android di telepon seluler (Sarwono, dalam Aman Bengkulu, 2013). Begitu juga dengan dalam bentuk buku belajar bagi siswa tingkat SMA. Di Kabupaten Bengkulu Utara sudah menerapkan buku ajarnya dalam bentuk muatan lokal. Kalau di Curup, Rejang Lebong, sudah ada juga, tetapi belum selesai yang di Bengkulu Utara, yang sudah menerap-

kan buku ajarnya dalam bentuk muatan lokal. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Sarwono (2015) menambahkan bahwa diperlukannya bahasa daerah diterapkan dalam pembelajaran muatan lokal dengan memperhatikan banyaknya penuturnya, khasanah lengkap, jauh dari bahasa Indonesia, dan menjadi langka atau mendekati kepunahan. Hal itu lebih tepatnya ada pada bahasa daerah Rejang.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti memaparkan permasalahan pengajaran bahasa daerah dan pemecahannya dengan mengambil beberapa kasus bahasa daerah yang sudah memiliki perda, yaitu Perda Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Rejang Lebong dengan tidak mengabaikan pada kasus-kasus daerah yang lain, daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Dengan harapan dapat memberikan masukan bagi kemungkinan pelestarian bahasa daerah terutama dalam proses pembelajaran di Provinsi Bengkulu terhadap kebijakan bahasa daerahnya dalam bentuk alternatif kerangka model kebijakan bahasa dan perencanaan bahasa daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi. Secara deskriptif penelitian ini dilakukan semata-mata berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan kabupaten lain pada umumnya, sedangkan secara kualitatif bertujuan mengungkapkan isi dan pesan-pesan atau maksud yang terkandung dalam aktivitas pembelajaran jika dihubungkan dengan kebijakan bahasa yang telah ditetapkan pemerintah (Mardalis, 1995:26 dan Muhadjir, 1996:49). Metode analisis isi merupakan metode yang memberikan perhatian pada isi pesan, dilakukan dalam dokumen-dokumen yang padat isi, pemaknaan isi

komunikasi lisan, memaknakan isi interaksi simbolik yang terjadi dalam peristiwa komunikasi. Metode analisis isi terdiri atas dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah, sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Dengan kalimat lain, isi komunikasi pada dasarnya juga mengimplikasikan isi laten, tetapi belum tentu sebaliknya. Objek formal metode analisis ini adalah isi komunikasi. Analisis terhadap isi laten akan menghasilkan arti, sedangkan analisis terhadap isi komunikasi akan menghasilkan makna (Ratna, 2010:48-49). Data diperoleh menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara/pencatatan.

PEMBAHASAN

Kebijakan bahasa merupakan suatu pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksudkan untuk dapat memberikan perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan, masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional (Halim 1976; Chaer 1995). Kebijakan bahasa (Chaer, 1995:232) merupakan satu pegangan yang bersifat nasional untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara, dan dapat diterima oleh segenap warga yang secara lingual, etnis, dan kultur berbeda. Hal itu dapat diartikan bahwa kebijakan bahasa merupakan pertimbangan konseptual dan politis untuk membuat perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dipakai dalam pengelolaan bahasa.

Kebijakan bahasa dapat dikelompokkan dalam tiga pendekatan, yaitu monolingualisme, persamaan multilingualisme, dan sistem bahasa regional. Beberapa negara menerapkan pendekatan tersebut, diantaranya Perancis mengikuti pendekatan pertama sejak

abad ketujuh belas, Belgia mengadopsi pendekatan kedua pada abad kedua puluh, sedangkan India menggunakan pendekatan ketiga sejak kemerdekaan. Dalam ketiga pendekatan tersebut, hanya pendekatan pertama yang dinyatakan secara implisit, sedangkan kedua pendekatan lainnya dirumuskan dalam perundang-undangan.

Upaya empiris dan eksplorasi deskriptif kasus kebijakan dan perencanaan bahasa nasional. Ricento mencirikan pengembangan KPB dalam tiga fase, makrososial politik, proses dan peristiwa; paradigma epistemologis; strategis ujung. Diambil dua tahap pertama menangani praktismasalah bahasa negara baru, pada awalnya dengan rasa optimis dan netralitas ideologis, dan kemudian dengan kesadaran yang berkembang dari dampak negatif potensial dan keterbatasan dari modernisasi serta model pengembangan upaya awal KPB (Hornberger dalam Sicento, 2006:197-203).

Faktor demografi sangat penting dalam menentukan kebijakan bahasa. Kebijakan bahasa dapat berjalan lancar jika bahasa ditentukan sebagai bahasa pertama ditentukan sebagai perluasan mayoritas pembicara di suatu Negara atau bahasa pertama menjadi bagian yang diabaikan oleh penduduk setempat. Penyamaan hukum antara dua atau lebih bahasa tampak seperti pada negara Kanada, dengan sejumlah bahasa terkecil secara bersamaan dipakai oleh sebagian besar mayoritas penduduknya. Konteks bahasa nasional-bahasa regional sangat sulit untuk didefinisikan. Salah satu konteks yang menonjol di India dan bekas Uni Soviet, berakibat secara signifikan bagi negara-negara yang menggunakan bahasa percakapan dalam sejumlah penduduk. Spanyol menerapkan kebijakan ini dengan melibatkan bahasa ketiga.

Faktor di atas memerlukan penjelasan secara mendalam. Berdasarkan pandangan pertama, India dan Nigeria tampak serupa. Keduanya merupakan negara bekas jajahan Inggris dengan berbagai pembagian

penduduk berdasarkan bahasa. India menerapkan kebijakan bahasa nasional-bahasa regional, sedangkan Nigeria memberlakukan secara resmi monolingualisme dalam bahasa asli, seperti bahasa Inggris. Tidak satu pun Negara yang mempertimbangan secara serius tentang kebijakan bahasa lain. Faktor perbedaan tampak dalam martabat bahasa asli, yang dipengaruhi oleh keyakinan para pengguna bahasa yang menganggapnya sebagai penghargaan terhadap bahasa nasional. Martabat kebahasaan ini mengandung tradisi kesusasteraan tertulis. Di India, keenam bahasa secara menyeluruh berfungsi sebagai bahasa kenegaraan (*state languages*) yang mengandung tradisi tertulis selama berabad-abad, contohnya, ketiadaan bahasa asli di Nigeria.

Secara ringkas, kebijakan bahasa nasional dapat didasarkan atas penghargaan varietas tunggal sebagai bahasa nasional tunggal, dan atau penghargaan terhadap dua atau lebih varietas tunggal sepanjang bangsa tersebut berada pada kedudukan resmi yang sama dengan varietas lain dalam sebagian bangsa khusus. Salah satu kebijakan ini menyertai toleransi terbesar atau terkecil terhadap bahasa lain dalam ruang lingkup hukum dan pendidikan. Keberhasilan kebijakan bahasa akan mempertimbangkan fakta demografi dari distribusi bahasa dalam kebangsaan dan penghargaan yang dihasilkan oleh setiap persaingan varietas bahasa.

Tujuan kebijakan bahasa (Chaer, 1995: 238) agar berlangsungnya komunikasi kenegaraan dan komunikasi intrabangsa dengan baik, tanpa menimbulkan gejolak sosial dan emosional yang dapat mengganggu bangsa. Lanjut Chaer (1995:239), kebijakan untuk mengangkat satu bahasa tertentu sebagai bahasa nasional dan sekaligus sebagai bahasa negara; atau mengangkat satu bahasa nasional dan mengangkat satu bahasa lain sebagai bahasa negara boleh saja dilakukan asal saja tidak membuat bahasa-bahasa yang lain yang ada di dalam negeri itu menjadi tersisih, atau membuat para penuturnya menjadi resah,

yang pada gilirannya dapat menimbulkan gejolak politik dan gejolak sosial. Dalam hal ini, Indonesia tampaknya telah dapat dengan tepat menyelesaikan masalah kebahasaan ini dengan menetapkan fungsi dan status bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing pada tempatnya masing-masing.

a. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa dan UUD 1945

Undang-Undang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bahasa, serta mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bahasa, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini. Namun, beberapa hal yang patut dicermati dalam UU ini tindak pidananya, yaitu tidak ada larangan dan tidak ada ancaman pidana. Tindak pidana tersebut sebaiknya diberikan kepada institusi atau lembaga resmi, seperti perusahaan atau institusi pemerintah dan tidak tertutup kemungkinan bagi petinggi pemerintahan atau akademisi dalam melanggar ketentuan penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, setiap lembaga harus berkoordinasi dalam menentukan ketentuan hukum pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia kepada Pusat Bahasa baik di tingkat maupun tingkat daerah. Hal tersebut dapat dicermati dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini adalah untuk (a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B dan untuk implementasinya ke dalam UU diperintahkan melalui Pasal 36 C. Namun demikian Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan hingga kini belum diatur secara lengkap dalam sebuah UU. Selama ini pengaturan tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan antara lain (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya. Untuk bendera, lambang, Negara, dan lagu kebangsaan sudah ada ketentuan hukum tindak pidana yang berlaku bagi setiap pelanggaran, tetapi dalam hal ini bahasa masih belum tampak peraturan dan ketentuan tindak pidana yang berlaku.

b. Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2009

Pentingnya bahasa ibu sudah diamanatkan pada UU no 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 37 ayat 1 yang mengatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan lokal, di antaranya bahasa daerah. Berdasarkan perda tersebut, kita patut memberikan apresiasi terhadap wujud nyata pemerintah dalam bahasa sebagai salah satu media dalam

pelestarian budaya, tetapi tidak cukup sampai di sana perlu adanya kebijakan teknis dalam pelestarian dan pembelajarannya baik di bidang formal maupun nonformal, seperti dalam penerapan pembelajaran di sekolah serta perlakuannya di pemerintahan.

Setiap daerah memiliki kewenangan sendiri dalam memelihara dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari unsur kebudayaan Indonesia yang memiliki bahasanya sendiri (UU nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 36 UUD 1945). Keadaan ini akan memunculkan kondisi saling menyaingi antardaerah dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing (dalam Mahsun, 2014). Namun, berbeda dengan kondisi yang ada di Provinsi Bengkulu dari sembilan kabupaten dan satu kota, hanya satu kabupaten yang menerapkan bahasa daerah dalam pembelajaran di kelas sebagai muatan lokal, yaitu Kabupaten Rejang Lebong.

Perda Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Rejang Lebong dinyatakan bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan (Bab X Pasal 44 Ayat 2). Bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Rejang dan bahasa Lembak yang ada di Rejang Lebong. Dalam perkembangannya, kebijakan bahasa daerah ini tidak terlepas dari kebijakan pendidikan. Adapun kebijakan pendidikan dalam mendukung bahasa daerah dalam lingkup pendidikan, yaitu kurikulum, buku murah bahkan gratis, bantuan operasional sekolah, evaluasi, jejaring, kelas baru, dan sarana. Adanya kebijakan pendidikan ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kualitas bahasa daerah dalam pembelajaran. Selain itu, kebijakan pemerintahan daerah dalam hal ini pendidikan setempat jauh lebih penting dalam menjalankan keberlangsungan bahasa daerah dalam lingkup pendidikan.

Pemerintah Daerah Rejang Lebong melalui Dinas Pendidikan Rejang Lebong

merupakan salah satu pemerintah daerah yang ikut melaksanakan dan menerapkan pelaksanaan pembelajaran muatan lokal dalam bentuk pembelajaran muatan lokal bahasa daerah Rejang yang dikenal dengan kurikulum bahasa Rejang Kaganga. Penerapan pelaksanaan pembelajaran muatan lokal ini sangat mengutamakan keunggulan dan potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi ciri khas dari suatu daerah. Kurikulum yang dikembangkan yan setempat dengan lambang dan huruf bahasa Rejang. Dukungan pemerintah dalam bentuk pengadaan sumber belajar dalam bentuk buku pelajaran, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kualitas pembelajaran dari segi kesiapan guru dalam mengajar.

Beberapa kendala dalam pembelajaran muatan lokal ini, yaitu belum adanya guru muatan lokal Kaganga dan Bahasa Rejang yang mempunyai spesifikasi khusus berlatar belakang pendidikan bahasa Rejang. Upaya yang dilakukan pemerintahan daerah, yaitu dengan menggunakan guru yang ada terutama guru kelas yang telah lama atau menetap di daerah setempat. Selain itu, belum adanya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan muatan lokal Kaganga baik pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal itu hanya sekedar diberikan pada beberapa matakuliah pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Padahal, beberapa guru kelas bisa dilatih dalam penerapan pembelajarannya mulai dari persiapan pembelajarannya, pelaksanaan, sampai pada evaluasi juga pada pengembangan perangkat pembelajaran. Untuk hal ini belum dilakukan oleh pihak pemerintah setempat. Sarana dan prasarana juga kurang mendukung karena pelaksanaan pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Pihak pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan hanya mengadakan bahan ajar atau buku.

c. Analisis terhadap Pengajaran Bahasa Daerah
Permasalahan pengajaran bahasa Indonesia tidak terlepas dari permasalahan pen-

didikan di Indonesia yang sangat kompleks. Menurut Tilaar (2009) masalah pokok pendidikan di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan masa pemerintahan suatu bangsa, yaitu masa orde lama dan orde baru, *a. Orde Lama*: 1) Pendidikan sebagai indo-krinasi. Politik dijadikan sebagai panglima. Segala kegiatan diarahkan kepada berbagai usaha untuk mencapai tujuan politik. Praksis pendidikan diarahkan kepada proses indo-krinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar. Pendidikan di Indonesia mulai diarahkan bukan kepada peningkatan kualitas tetapi dijadikan sebagai alat kekuasaan dalam mencapai tujuan politik. *b. Orde Baru*. 1) Pendidikan sebagai alat penyeragaman. 2) Ekonomi sebagai panglima. 3) Pendidikan mengingkari kebhennikaan.

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di Kabupaten Rejang Lebong terintegrasi dengan KTSP yang disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal ini disusun oleh tim pengembangan kurikulum yang beranggotakan guru-guru, penyusunan rencana pembelajaran mengacu pada komponen yang ada dalam merancang pembelajaran berdasarkan KTSP. Hal ini diberikan pada jenjang kelas IV, Kelas V, dan Kelas VI dengan beban belajar perminggu sebanyak dua jam pelajaran dengan materi kompetensi membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Penyajian pembelajaran dilakukan dengan dialog singkat, pelatihan lisan dialog yang disajikan, tanya jawab, pengkajian, penarikan kesimpulan, aktivitas interpretatif, aktivitas produksi lisan, pemberian tugas, dan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di Kabupaten Bengkulu Utara sudah diterapkan pada semua jenjang pendidikan baik SD, SLTP, maupun di SLTA, namun masih pada beberapa sekoah yang ditentukan saja.

Kompetensi membaca dimaksudkan agar siswa dapat memahami bacaan bahasa Rejang dan menggunakan tulisan kaganga yang menjadi alat komunikasi masyarakat

Rejang. Dengan memahami bahasa Rejang sebagai bahasa daerah setempat, siswa akan menghormati budaya setempat dengan bertindak sesuai kearifan lokal yang dimiliki. Hal itu bisa juga dilakukan dengan memasukkan unsur sastra dalam keterampilan membaca. Sayuti (2003:514) mengemukakan bahwa sastra memiliki nilai-nilai kemanusiaan baik cara berpikir, perilaku religius, adat istiadat, sejarah, maupun nilai kultural lainnya.

Menulis kaganga mempunyai keterampilan sendiri karena bentuk dan penggunaan tulisan kaganga sangat berbeda dengan kaidah penulisan huruf latin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penggunaan simbol-simbol pada tulisan kaganga mempunyai tata cara tersendiri dalam penerapannya. Simbol-simbol tulisan yang mempunyai kaidah pembentuk kata dan kalimat juga sangat berbeda dengan penggunaan bahasa Indonesia. Namun, pelaksanaan menulis pada masyarakat di Bengkulu Utara masih “kering”. Lebih banyak pada menulis huruf kaganga sehingga siswa kurang menarik dalam mengikuti pembelajaran.

Menyimak pada pembelajaran muatan lokal kaganga dimaksudkan untuk menyimak materi dalam bahasa Rejang dengan mengedepankan muatan pada keunggulan daerah, seperti sejarah tanah Rejang dan peristiwa sejarah pada daerah ini. Siswa juga dituntut untuk menyimak bunyi bahasa yang diucapkan dengan dialek daerah. Terdapat kelompok-kelompok kosakata yang mempunyai bunyi bahasa yang sama, tetapi artinya berbeda, demikian juga terdapat bunyi yang tidak sama tetapi memiliki arti yang sama.

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal didasarkan pada kebutuhan daerah, kaganga sebagai salah suatu materi pembelajaran kurikulum muatan lokal memiliki andil yang cukup baik untuk mengisi kebutuhan tersebut. Materi yang cukup bervariasi pada penerapan bahasa Rejang merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Pene-

rapan dan pemilihan materi seyogyanya dikembangkan mencakup materi yang dapat mewakili masyarakat Rejang secara keseluruhan. Semakin berkembang materi yang digunakan dalam penyusunan kurikulum, semakin baik dan mewakili kondisi siswa dan masyarakat sehingga kelestarian budaya akan dapat terpelihara. Penerapan salah satu budaya yang kurang berimbang akan terjadi perkembangan budaya yang satu dan menghambat perkembangan budaya yang lain.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Suwardi (2006) bahwa kompetensi guru bahasa Jawa yang perlu dikuasai, yaitu kompetensi mental (tatakrama, sikap otonom dan kreatif), kompetensi profesional (strategi belajar, perkembangan jiwa siswa, sikap berbudi), dan kompetensi bustansial (membaca-menulis, menembang, pidato, membaca serta mencipta karya sastra). Selain itu, hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan kompetensi guru, yaitu kompetensi sosial, pedagogik, dan kepribadian. Selain itu, kebijakan berkaitan dengan buku teks, yaitu buku teks perlu disusun oleh beberapa tim ahli, dikaji oleh tim ahli, merangsang siswa belajar mandiri, tidak berbau komersial, menciptakan suasana riang, suka, dan ceria.

d. Analisis terhadap Politik Bahasa

Politik Bahasa Nasional (PBN) tidak terlepas dengan Kebijakan Bahasa Nasional (KBN). PBN merupakan hasil seminar tahun 1975, sedangkan KBN merupakan hasil seminar tahun 1999. Masalah PBN masih terpaku pada masalah bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, sedangkan KBN lebih luas lagi dengan menambahkan aspek lain, yaitu sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing. Mengenai penamaan PBN menempatkan bahasa Melayu sebagai bagian dari bahasa daerah, sedangkan KBN secara tegas mengisyaratkan bahwa bahasa rumpun Melayu dipandang sebagai bahasa tersendiri. Untuk butir-butir persoalan pengajaran, PBN lebih luas cakupannya dibanding-

kan dengan KBN, tidak hanya meliputi kurikulum, bahan ajar, tenaga kependidikan, kebahasaan, dan sarana, tetapi juga menyangkut penelitian pengajaran, penentuan didaktik dan metodik yang sesuai, serta pengembangan kepastakaan. Itu artinya KBN merupakan penyempurnaan dari PBN yang pada prinsipnya saling mendukung dan melengkapi dalam peran dan kedudukan bahasa apakah suatu bahasa sebagai PBN atau sebagai KBN.

Politik bahasa nasional dalam konteks bahasa daerah terutama dalam pembelajaran bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Rejang. Pelaksanaan pembelajarannya dalam perencanaannya masih kurang atau belum sesuai dengan kurikulum atau perencanaan yang diharapkan. Begitu juga dengan pengembangannya, guru kurang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan bahan ajar yang telah tersedia. Begitu juga dengan guru mata pelajarannya masih diampu oleh guru kelas dengan menggunakan bahan ajar Baso Jang Te mencakup materi bahasa Rejang dan tulisan kaganga. Selain itu, bahan ajar yang disajikan seolah masih “kering”. Artinya lebih pada pembelajaran menulis huruf kaganga sehingga siswa mengalami kesulitan dan bosan dalam belajar. Hal itu perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pada setiap daerah agar mampu menerapkan bahasa daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Berikut ini dapat dilihat model dan rancangan kebijakan bahasa sebagai alternatif dalam pengembangan dan pembinaan bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu.

Tabel 1. Kebijakan Bahasa dan Perencanaannya: Kerangka Integratif

Tipe	<i>Pendekatan perencanaan kebijakan (pada bentuk)</i>	<i>Pendekatan perencanaan budaya (pada fungsi)</i>
Perencanaan Status (sekitar penggunaan bahasa)	Kelompok Pendidikan/Sekolah Sastra Keagamaan Media massa Keja	Pemerolehan kembali Pemerolehan Perubahan Bahasa asing/keduaBahasa/literasi

	Pilihan Peran bahasa formal di masyarakat <i>Tujuan ekstralinguistik</i>	Implementasi Peran fungsional bahasa di masyarakat <i>Tujuan ekstralinguistik</i>
Implementasi Peran fungsional bahasa dalam masyarakat <i>Tujuan ekstralinguistik</i>	Standardisasi korpus Standardisasi kode/pembakuan tambahan Pengabdian	Modernisasi (fungsi baru) Leksikal Stilistika Renovasi (bentuk baru, fungsi tua) Purnurnian Pembaharuan Penyederhanaan gaya Terminologi unifikasi
	Kodifikasi Bentuk bahasa <i>Tujuan linguistik</i>	Elaborasi Fungsi bahasa <i>Tujuan semilinguistik</i>

(Hornberger in Sicento, 2006:24-41)

Kebijakan bahasa dan perencanaan bahasa daerah di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan dengan dua tipe, yaitu perencanaan status dan implementasi yang mengacu pada bentuk (kebijakan) dan fungsi bahasa masyarakat Bengkulu (pelestarian bahasa). Perencanaan status merupakan usaha menentukan atau memilih suatu dealek atau bahasa yang ada untuk dijadikan bahasa yang bersatus tertentu, misalnya bahasa yang ada di Kabupaten Kaur dengan menggunakan dua bahasa daerah dalam satu kabupaten, yaitu bahasa Besemah dan bahasa Mulak sehingga dalam pelaksanaan pembelajarannya perlu menjadi perhatian khusus pada daerah tertentu. Model di atas tersebut tepat digunakan bagi masyarakat Bengkulu yang masih memerlukan penataan dan peencanaan yang matang karena terbatasnya kebijakan yang ditetapkan daerah baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Perencanaan bahasa merupakan usaha yang terkait dengan pembentukan istilah, pembakuan ejaan, pembakuan tata bahasa, dan bagaimana penerapannya dalam praktik bahasa.

Menurut Moeliono (1985:5-11) perencanaan bahasa harus dilihat dari dua sudut pandang, yakni perencanaan fungsional dan perencanaan proses. Dari sisi perencanaan

fungsional, perencanaan itu tidak semata-mata meramalkan masa depan berdasarkan apa yang diketahui pada masa lampau, tetapi merupakan usaha yang terarah untuk memengaruhi masa depan itu. Contohnya pembuatan tata ejaan yang normatif, penyusunan tata bahasa dan kamus, yang akan menjadi pedoman bagi penulis dan penutur di dalam masyarakat yang tidak homogen. Dalam konteks perencanaan fungsional ini, banyak pakar bahasa yang mengemukakan gagasannya. Garvin (dalam Moeliono, 1985:9), misalnya, dalam ulasannya terhadap konsep perencanaan bahasa mengajukan pendapat bahwa di dalam perencanaan harus dibedakan dua hal: (1) pemilihan bahasa untuk maksud dan tujuan yang direncanakan; misalnya sebagai bahasa kebangsaan, atau bahasa resmi, dan yang melibatkan banyak faktor di luar bahasa; dan (2) pengembangan bahasa yang terutama bertujuan meningkatkan taraf keberaksaraan dan usaha membakukan bahasa.

Dalam kaitan perencanaan sebagai proses, Moeliono, antara lain, mengemukakan pendapat Haugen (1966a dalam Moeliono, 1985:9) yang menganjurkan agar perencanaan bahasa dimulai dengan pengetahuan situasi kebahasaan. Setelah itu, disusun program kegiatan yang meliputi sasaran, penetapan garis haluan atau kebijakan untuk mencapai sasaran itu dan sejumlah prosedur untuk melaksanakan program itu. Pada akhirnya dilakukan penilaian terhadap garis haluan dan kegiatan pelaksanaannya. Prosedur tersebut dapat dipecahkan menjadi empat jenis, yaitu perumusan garis haluan, kodifikasi, elaborasi/pemekaran, dan implementasi atau pelaksanaan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Undang-Undang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bahasa. Kenyataannya dari sembilan kabupaten dan satu kota madya, hanya satu Kabupaten Rejang Lebong yang memunyai

perda daerah dalam hal budaya, bahasa, pengajaran bahasa, dan politik bahasa. Pendidikan sebagai penyelenggara kebijakan, yaitu perguruan tinggi masih menyikapi pada salah satu penyiapan tenaga pendidik yang masih fokus ke satu bahasa tanpa memandang aspek bahasa lainnya sehingga berpengaruh pada penyiapan tenaga pendidik, pihak sekolah masih sangat terbatas menerapkan pembelajaran bahasa daerah yang masih pada muatan lokal pilihan, dan masyarakat masih terbatas pada penggunaan tradisi bahasa dan budaya tanpa berorientasi pada keberlangsungan dan pelestarian bahasa dan budaya yang dikembangkan. Selain itu, pihak pemerintah kurang tanggap dan peka terhadap fenomena bahasa dan budaya masyarakat minoritas, serta kondisi geografisnya. Untuk butir-butir persoalan pengajaran, politik bahasa nasional lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kebijakan bahasa nasional, tidak hanya meliputi kurikulum, bahan ajar, tenaga kependidikan, kebahasaan, dan sarana, tetapi juga menyangkut penelitian pengajaran, penentuan didaktik dan metodik yang sesuai, serta pengembangan kepastakaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan perencanaan bahasa dalam pendidikan berdasarkan kebijakan bahasa yang telah ada dalam perda, yaitu (1) Bahasa dan pendidikan bekerjasama dalam membentuk, memelihara, serta mengangkat martabat manusia. (2) Hubungan dan pertalian yang erat antara pengembangan bahasa dan pengembangan pendidikan berlangsung dalam keluarga, lembaga-lembaga pendidikan formal, dan masyarakat. (3) Perlu adanya penekanan dan peninjauan lagi dalam hal penggunaan bahasa baik isi dan metode pengajaran yang terdapat dalam kurikulum (4) Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tampak perlu adanya kesamaan selera dalam penggunaan bahasa atau istilah.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu (1) Pemerintah perlu mengintensifkan dan menyosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan ke arah pembelajaran

sederhana, bermanfaat, menyenangkan, dan menanamkan budi pekerti luhur. (2) Diperlukan payung berupa SK gubernur/walikota/bupati dan Perda pembelajaran bahasa daerah Bengkulu dari masing-masing daerah. (3) Pemerintah dan masyarakat perlu menyiapkan kompetensi guru bahasa daerah Bengkulu yang memadai dengan cara melakukan uji kompetensi baik tingkat awal pengangkatan guru maupun setelah menjadi guru. (4) Perlu segera melakukan pelatihan-pelatihan intensif di tiap-tiap dinas pendidikan berkaitan dengan inovasi pembelajaran. (5) Perlu segera disusun kurikulum dan buku teks yang memadai dengan mempertimbangkan aspek idealisme, khususnya Bengkulu bagian Selatan (Manna, Kaur, Seluma), Kota Bengkulu, dan Muko-muko.

DAFTAR PUSTAKA

- Arono. 2004. "Bahasa Besemah di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur: Sebuah Kajian Giografi Dialek". Padang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
- Alwasiah, Chaedar. 1985. *Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Alwi, Hasan & Dendi Sugono (Ed.) 2003. *Politik Bahasa; Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Progres.
- Aman Bengkulu. 2013. "Kaganga Digitalisasi 4 Aksara Ulu Bengkulu Rampung". <http://amanbengkulu.or.id/kaganga-digitalisasi-4-aksara-ulu-bengkulu-rampung/>. Bengkulu, 28 Juli 2015.
- Chaer, Abdul. 1995. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cooper, Robert L. 1989. *Language Planning and Social Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fasold, Ralph. 1984. *The Sociolinguistics of Society*. USA: Basil Blackwell.
- Ferguson, Gibson. 2006. *Language Planning and Education*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Frier, Paulo. 2004. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Penerjemah Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Amran (Ed.) 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Hornberger, Nancy H. 2006. "Frameworks and Models in Language Policy and Planning" in *In Introduction to Language Policy: Theory and Method*. Editor Thomas Ricento. USA: Blackwell Publishing.
- Jernudd, Bjorn H. & das Gupta, Jyotirindra. *Towards A Theory of Language Planning*. Dalam Joan Rubin & Bjorn H. Jernudd (Ed.) 1975, *Can Language Be Planned* (195-215). Honolulu: The University Press of Hawaii.
- Liddicoat, Anthony J. (Ed.) 2007. *Language Planning and Policy: Issues in* Holmes, Janet. 1992. *An Introduction to Sociolinguistics*. New York: Longman *Language Planning and Literacy*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Liddicoat, Anthony J and Richard B. Baldauf Jr. 2008. *Language Planning and Policy: Language Planning and Local Contexts*. Canada: British Library Cataloguing in Publication Data.
- Mahsun. 2003. "Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebhinekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: Ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah" dalam *Politik Bahasa; Risalah Seminar Politik Bahasa*. Editor Alwi, Hasan & Dendi Sugono. Jakarta: Progres.
- Mahsun. 2014. "Fungsi Bahasa Daerah dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah". <http://prof-mahsun.com/fungsibahasa-daerah-dalam-eraglobalisasi-dan-otonomi-daerah>. Bengkulu, 20 Juli 2014.
- Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moeliono M. Anton. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Penerbit

- Pahala Djambatan.
- Muhadjir, Neong. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muslich, Masnur. 2010. *Dasar-dasar Perencanaan Bahasa pada Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Ramlan M, I Dewa Putu Wijana, Johannes Tri Mastoyo, Sunarso. 1992. *Bahasa Indonesia yang Salah dan yang Benar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Denpasar: Pustaka Pelajar.
- Robin Joan dan Bjorn H Jermud. 1971. *Can language be Planed?* Honolulu : The University Press of Hawaii.
- Santoso, Anang. 2003. *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Sayuti, Sominto A. 2003. "Pengajaran Sastra sebagai Media Transformasi Edukatif Kultural, dan Keluhuran Budi Manusia". Dalam Sujarwanto dan Jabrohim (Ed) *Bahasa dan Sastra Indonesia Menuju Abad XXI*. Yogyakarta: Gama Media.
- Simajuntak, Rindu Parulian. 2014. "Measuring Proficiency in Standard Indonesian for Enggano Speakers" dalam *Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia* Volume ke-32, Nomor 1. Februari 2014
- Sugono, Dendi. 2010. *Pemertabatan Bahasa Nusantara dalam Perspektif Lokal, Nasional dan Global*. Makalah. Kementerian Pendidikan Nasional: Jakarta.
- Sugono, Dendi. 2011. "Perencanaan Bahasa di Indonesia dalam Era Globalisasi". Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Bahan Kuliah Matakuliah Perencanaan Bahasa S-3 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia SPS UPI, 27 Mei 2011).
- Sugono, Dendi. 2010. *Perencanaan Bahasa dalam Era Globalisasi*. Makalah Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta
- Sugono, Dendi. 2010. *Pengutamakan Bahasa Indonesia Membangun Karakter Bangsa*. Makalah. Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta
- Suwardi. 2006. Kebijakan, Idealisme, dan Inovasi: Pembelajaran bahasa Jawa dalam Konteks Kebenekatunggalakaan. Dalam *Kebijakan Bahasa Jawa IV* di Semarang, 10 – 14 September 2006.
- Tilaar, H. A. R. 2009. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
-